

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan pekerja bukan merupakan suatu hal yang asing di Indonesia, dalam sejarahnya kemunculan serikat pekerja sudah ada bahkan sejak era sebelum kemerdekaan, yang pada waktu itu tujuannya selain untuk mewujudkan kesejahteraan mereka juga tak terpisahkan dengan pergerakan nasional untuk kemerdekaan bangsa.

Pada awal 1900-an hingga memasuki Era Pra Kemerdekaan Indonesia kiprah gerakan pekerja ini ditandai oleh kegigihan para tokohnya dalam skala perjuangan nasional ataupun keberhasilan dalam memperjuangkan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja dan hak kaum pekerja. Pada era sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (awal 1900-an-1945), pembentukan gerakan pekerja yang lebih banyak berupa serikat buruh lebih cenderung berlatar belakang politik daripada pertimbangan sosial-ekonomi. Pada era ini perjuangan gerakan pekerja dalam memperoleh persamaan hak politik dan politik bersifat paralel dengan perjuangan partai politik yang sangat radikal (Hidajat, 2012: 2).

Motif politik yang mengiringi gerakan pekerja di Indonesia pada Era sebelum kemerdekaan, tampaknya berpengaruh terhadap gerakan buruh setelah proklamasi kemerdekaan-atau setidaknya sampai dengan tahun 1970-an ketika atas nama “akselerasi pembangunan nasional” dilakukan penyederhanaan gerakan organisasi pekerja, khususnya serikat buruh. Perjuangan serikat buruh tidak semata untuk meningkatkan perbaikan nasib para anggotanya, tetapi juga focus untuk memenangkan perjuangan partai politik yang menaunginya untuk meraih kekuasaan dalam kehidupan politik Indonesia (Hidajat, 2012: 5).

Sedangkan karakteristik gerakan pekerja pasca reformasi cenderung berbeda dengan karakteristik era sebelumnya, lebih lanjut hal ini pula dikatakan oleh Simanjuntak (2000:46) menyatakan bahwa:

Karakteristik gerakan pekerja pasca reformasi ini nampaknya mundur kembali ke kondisi sebelum deklarasi buruh 1973. Pertama beberapa bentuk organisasi pekerja yang telah melebur, memunculkan diri kembali. Kedua beberapa organisasi pekerja baru secara jelas atau tersamar mempunyai orientasi setarian atau terkait dengan partai politik atau agama. Ketiga beberapa organisasi pekerja baru cenderung mengutamakan pembentukan organisasinya di perusahaan yang telah terbentuk FSPSI atau SPSI Reformasi atau SPTP. Dengan demikian di beberapa perusahaan akan terbentuk lebih dari satu organisasi pekerja.

Pada era 2000-an terutama sejak ratifikasi konvensi No.87 mengenai kebebasan berserikat dan didorong oleh semangat reformasi, organisasi serikat pekerja di Indonesia berkembang dengan cepat, baik yang bersifat federatif maupun menurut organisasi perusahaan. Hingga pertengahan tahun 2000, telah terdaftar 20 serikat pekerja tingkat nasional yang berbentuk federasi, 40 serikat pekerja menurut organisasi perusahaan serta sekitar 1200 serikat pekerja tingkat perusahaan independen atau tidak berafiliasi dengan serikat pekerja yang lain (Simanjuntak, 2000: 5). Dan didorong oleh ratifikasi konvensi No.87 mengenai kebebasan berserikat pula pembentukan organisasi pekerja pun tidak terbatas di lingkungan perusahaan swasta saja organisasi pekerja juga pembentukannya mulai berkembang di tingkat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sebelumnya dikumpulkan dalam satu organisasi yang sama yakni di Korps Organisasi Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). KORPRI sendiri dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971, yang didasari atas pemikiran perlunya melakukan perbaikan guna mewujudkan keutuhan dan kekompakan seluruh pegawai pasca pemilu 1971. Anggota KORPRI sendiri merupakan seluruh Pegawai Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud Pegawai Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar KORPRI yakni: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan BUMD, Pegawai Bank milik Negara dan Daerah, Pejabat dan petugas urusan pemerintahan Desa serta ABRI yang dikaryakan pada lembaga-lembaga sebelumnya (Dalimunthe, 2005:46). Tentunya

sebagai perusahaan BUMN maka seluruh pegawai PT Dirgantara Indonesia secara otomatis tergabung ke dalam KORPRI.

Serikat pekerja/serikat buruh sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam lingkungan kerja seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Yang menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh beserta keluarganya. Mencermati fungsi serikat pekerja tersebut, bahwa betapa pentingnya keberadaan dari sebuah serikat pekerja bagi para pekerja pendiriannya tidak bisa didirikan dengan sembarangan, tidak hanya sebatas pelengkap ataupun sekedar formalitas untuk memenuhi suatu unsur dalam undang-undang saja. Karena dalam kenyataannya serikat pekerja merupakan pihak pertama yang bertindak saat terjadi sengketa antara pekerja dengan perusahaan, dan tidak jarang disertai dengan upaya-upaya yang teramat gigih dilakukan dalam hal pembelaan hak para pekerja. Gerakan serikat pekerja dan buruh merupakan alat dan sarana bentuk eksistensi perjuangan pekerja dan buruh untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum pekerja dan buruh yang memiliki posisi tersendiri diantara kekuatan-kekuatan sosial lain yang efektif untuk memobilisasi massa dan anggotanya. Maka dengan semua itu serikat pekerja telah menjadi keharusan yang ada di tiap lingkungan perusahaan, begitu pun di lingkungan PT Dirgantara Indonesia terdapat beberapa serikat pekerja seperti SP-FKK (Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan) PT Dirgantara Indonesia, SPEDI (Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia), Serikat Pekerja CN-25.

Upaya memperjuangkan hak tidak mengenal akhir. Prinsip itulah yang terus dipegang sebagian karyawan PT Dirgantara Indonesia sebagai respon atas adanya kebijakan pemutusan hubungan kerja besar-besaran sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan berdasarkan SK yang ditandatangani direktur utama Edwin Soedarmo. Mereka terus berjuang dari satu pengadilan ke pengadilan lain; berkonvoi dari Bandung ke Jakarta; demonstrasi mulai dari depan

pabrik perusahaan penghasil pesawat terbang itu hingga ke Istana Negara. Meski memang lewat PTUN dan jalur pidana, hak-hak sebagian eks karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SPFKK) PT DI tetap tidak terpenuhi. Janji Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karyawan DI tak kunjung kelar. Berdasarkan catatan para buruh, perusahaan masih terutang sekitar Rp.200 miliar kepada mereka. Untuk mengembalikan utang itu, ratusan eks karyawan mencoba jalur lain yakni lewat kepailitan (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17520/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit> 10/6/2014).

Puncaknya pada 2007 gerakan pekerja PT Dirgantara Indonesia berhasil memenangkan gugatan pailit terhadap perusahaan yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diketuai Andriani Nurdin mengabulkan permohonan itu. PT Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit, hal tersebut ditetapkan karena perusahaan belum sepenuhnya hak karyawan menyusul kemudian penunjukan tim kurator yang bertugas menyelesaikan proses pembayaran utang kepada kreditor serta para mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia oleh majelis hakim (Irahali, 2008: 283).

Ada beberapa alasan yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai serikat pekerja PT Dirgantara Indonesia khususnya tahun 2003-2007, *pertama* masih jarang sekali literatur yang mengangkat tentang serikat pekerja, selain itu konflik hubungan industrial yang berujung pemailitan perusahaan seperti upaya yang dilakukan serikat pekerja PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu hal yang jarang terjadi di Indonesia, *kedua* adanya ketertarikan penulis untuk mengkaji secara mendalam mengenai perkembangan serikat pekerja khususnya serikat pekerja BUMN. *Ketiga*, sudah banyak tulisan mengenai PT Dirgantara Indonesia baik berupa kajian berbentuk buku maupun skripsi, namun belum ada yang membahas tentang gerakan pekerjaanya secara khusus. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengungkapkan perkembangan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia itu sendiri. Dengan demikian peneliti ingin membuat penelitian yang berjudul “Dari Jalan Pajajaran

Hingga Istana Merdeka: Perjuangan Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Tahun 2003-2007”.

Kurun waktu yang dipilih oleh penulis dalam kajian ini adalah tahun 2003-2007. Awal kajian dimulai pada tahun 2003 karena pada saat itu sengketa antara pekerja PT Dirgantara Indonesia dengan perusahaan dimulai, yakni dengan adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran pekerjanya sebagai imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia kala itu. Sedangkan akhir kajian dipilih pada 2007 yang berkaitan dengan dikeluarkannya putusan pailit kepada perusahaan oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia itu sendiri .

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Jejak Langkah gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2003-2007”. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka peneliti memfokuskan permasalahan dalam beberapa rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang munculnya Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2003-2007 ?
2. Bagaimana upaya dan dinamika Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja tahun 2003-2007?
3. Bagaimana pengaruh Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia terhadap kondisi dan status para pekerja pada tahun 2007 ?
4. Apa saja Faktor-faktor pendorong dan penghambat Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2003-2007

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai latar belakang munculnya Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2003-2007.
2. Menjelaskan upaya dan dinamika dari Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia dalam upaya memperjuangkan hak-hak para pekerja pada tahun 2003-2007.
3. Memaparkan pengaruh dari gerakan serikat pekerja PT Dirgantara Indonesia terhadap kondisi dan status dari para pekerja.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2003-2007

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Mengetahui salah satu organisasi serikat pekerja di Indonesia dan bentuk pergerakannya.
2. Memperkaya pemahaman mengenai salah satu serikat pekerja dan bentuk pergerakannya di Indonesia
3. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan penelitian sejarah mengenai perkembangan gerakan pekerja khususnya gerakan pekerja PT Dirgantara Indonesia

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Maka untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis mengungkapkan latar belakang masalah, mengapa penulis memilih tema ini. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang akan di bahas, batasan masalah yang ditulis pada bagian selanjutnya bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari garis tentang hal-hal yang akan

disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Bagian terakhir adalah struktur organisasi penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian serta penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang tema kajiannya dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis mencoba menjabarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul “Dari Jalan Pajajaran Hingga Istana Merdeka: Perjuangan Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Tahun 2003-2007”

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan adalah metode historis. Tahapan-tahapan metodenya adalah sebagai berikut: memilih suatu topik yang sesuai, mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik, membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditentukan ketika penelitian sedang berlangsung, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber), menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya, dan menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Bab IV Dari Jalan Pajajaran Hingga Istana Merdeka: Perjuangan Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Tahun 2003-2007, bab ini berisi tentang Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja tahun 2003-2007, latar belakang munculnya gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2003-2007, Dinamika Perjuangan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia yang terjadi selama tahun 2003-2007, upaya Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia

dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja tahun 2003-2007, serta hasil yang dicapai dari Gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia dalam hal kondisi dan status para pekerja pada tahun 2003-2007. Semua hal tersebut dikaji dengan menggunakan sumber literatur dan sumber lisan yang relevan.

Bab V Kesimpulan dan saran, merupakan inti jawaban serta analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan merupakan hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan hasil penelitian serta interpretasi peneliti mengenai inti dari pembahasan. Pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, dalam bab ini juga terdapat saran atau rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.